



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 92), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 20 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

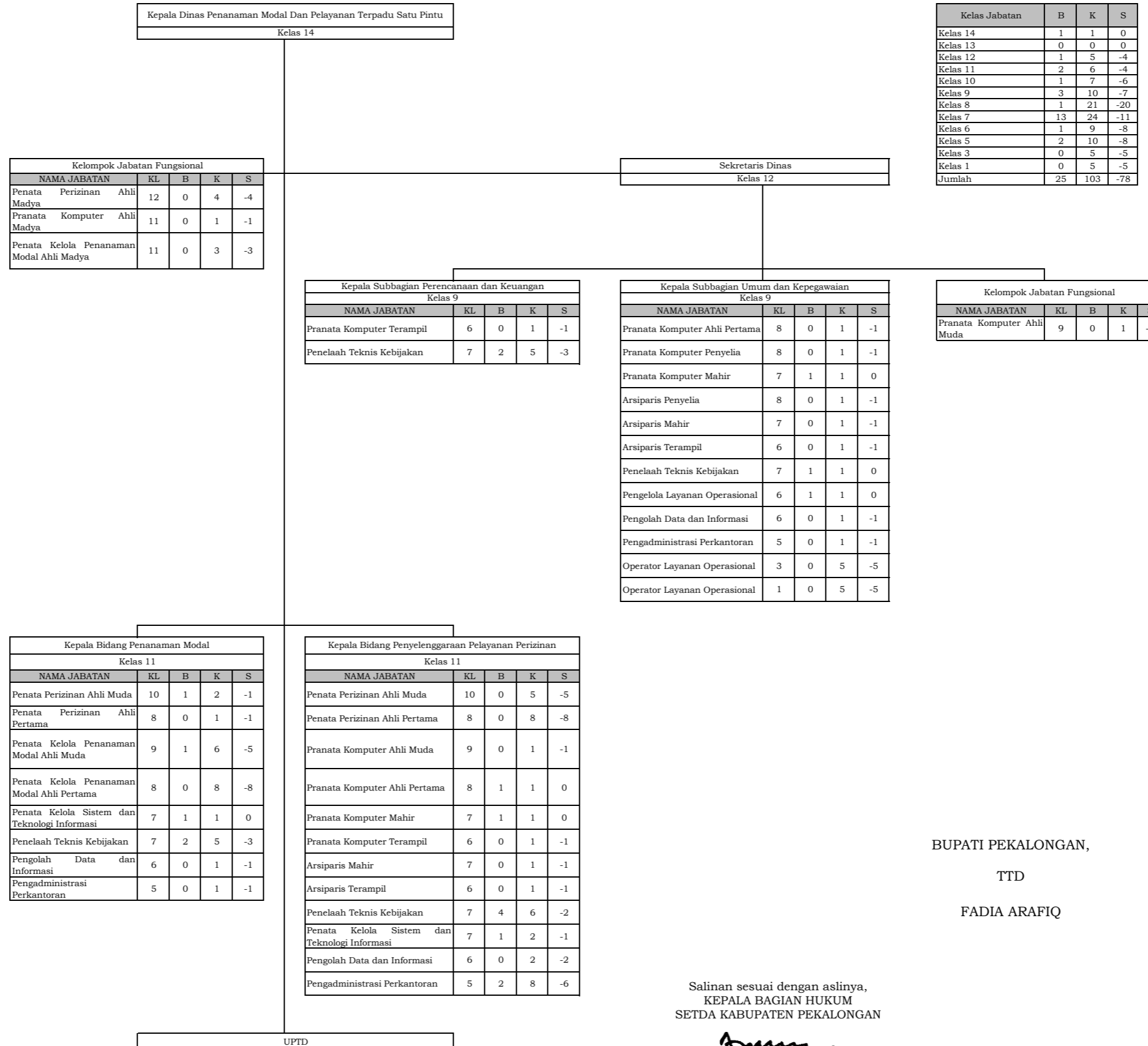
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBA, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Kelas 14				

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Perizinan Ahli Madya	12	0	4	-4
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	1	-1
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	11	0	3	-3

Sekretaris Dinas				
Kelas 12				

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5	-3

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	3	0	5	-5
Operator Layanan Operasional	1	0	5	-5

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 14	1	1	0
Kelas 13	0	0	0
Kelas 12	1	5	-4
Kelas 11	2	6	-4
Kelas 10	1	7	-6
Kelas 9	3	10	-7
Kelas 8	1	21	-20
Kelas 7	13	24	-11
Kelas 6	1	9	-8
Kelas 5	2	10	-8
Kelas 3	0	5	-5
Kelas 1	0	5	-5
Jumlah	25	103	-78

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1

Kepala Bidang Penanaman Modal				
Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Perizinan Ahli Muda	10	1	2	-1
Penata Perizinan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	9	1	6	-5
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	0	8	-8
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan				
Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Perizinan Ahli Muda	10	0	5	-5
Penata Perizinan Ahli Pertama	8	0	8	-8
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	6	-2
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	8	-6

Keterangan :  
 KL : Kelas Jabatan  
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia  
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja  
 S : Selisih

BUPATI PEKALONGAN,  
 TTD  
 FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680517 198903 1 009

UPTD